

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi persoalan mendasar yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian besar terhadap persoalan ini karena kemiskinan tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis sosial yang lebih luas. Menurut Mulyadi (2020), kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, perawatan kesehatan, serta tempat tinggal yang layak. Kenyataan ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan bukan sekadar isu ekonomi, tetapi berkaitan erat dengan aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (2024), pada bulan September 2024 terdapat lebih dari 24,06 juta jiwa atau sekitar 8,57% dari total penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini mencerminkan bahwa problematika kemiskinan masih cukup signifikan dan perlu perhatian serius. Selain menurunkan kualitas hidup masyarakat miskin, kemiskinan juga berdampak pada stabilitas ketahanan pangan nasional, karena rumah tangga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi biasanya menghadapi kesulitan dalam memperoleh makanan bergizi dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, keterbatasan ekonomi yang dialami keluarga miskin seringkali memicu berbagai persoalan sosial lainnya seperti putus

sekolah, pengangguran, hingga kerentanan terhadap tindak kriminal (Rahmatika, 2024).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis guna mengatasi persoalan ini, salah satunya melalui pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi nyata dari negara yang bertujuan untuk mengurangi beban hidup masyarakat yang tergolong miskin dan rentan. Instrumen ini memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Solihin Sopandi et al. (2021), bantuan sosial bisa diberikan dalam bentuk uang tunai maupun bantuan fisik, tergantung pada kapasitas anggaran dari daerah atau lembaga yang berwenang. Penyaluran bantuan ini didasari oleh prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, akal sehat, dan kebermanfaatan bagi penerimanya.

Di Indonesia sendiri, terdapat sejumlah program bantuan sosial yang sudah dijalankan secara nasional, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Siswa Miskin. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk memberikan dukungan yang konkret kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui berbagai skema tersebut, pemerintah berupaya agar kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Seperti dijelaskan oleh Kementerian Sosial (2024), tujuan utama dari berbagai program ini adalah memberikan perlindungan sosial dan memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat

secara menyeluruh, sehingga mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih layak.

Permasalahan yang kerap muncul dalam proses penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah adalah ketidaktepatan sasaran, di mana bantuan justru tidak selalu diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketidaktepatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Salah satu faktor utama adalah terbatasnya jumlah bantuan yang tersedia, sehingga pemerintah harus melakukan seleksi terhadap calon penerima. Dalam situasi di mana kondisi ekonomi warga relatif serupa, proses identifikasi kelompok paling membutuhkan menjadi semakin rumit. Sulitnya membedakan antara warga yang benar-benar membutuhkan dengan yang tidak, menjadi tantangan signifikan dalam mewujudkan distribusi yang adil dan merata.

Selain itu, keputusan mengenai siapa yang berhak menerima bantuan sosial sering kali terpengaruh oleh aspek subjektif. Pertimbangan pribadi, kedekatan sosial, hingga intervensi yang tidak berdasarkan kriteria objektif tertentu, turut menyebabkan bantuan tidak sampai ke tangan yang seharusnya. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap efektivitas program sosial, karena sasaran bantuan tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan awal program tersebut. Padahal, seperti yang dijelaskan oleh Salsabila et al. (2024), tolok ukur utama efektivitas bantuan sosial seharusnya ditentukan oleh seberapa tepat bantuan tersebut diterima oleh mereka yang benar-benar memenuhi kriteria, agar manfaatnya optimal dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Kondisi serupa juga dialami oleh masyarakat Desa Purwoagung, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, di mana ketidaktepatan sasaran bantuan menjadi keluhan utama warga. Sebagian masyarakat di sana merasa bahwa bantuan sosial diberikan kepada pihak-pihak yang kurang layak, sementara warga dengan kondisi ekonomi lebih parah justru tidak mendapatkannya. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang merusak hubungan antarmasyarakat dan memunculkan rasa ketidakadilan. Akibatnya, bukan hanya tujuan utama bantuan sosial menjadi tidak tercapai secara maksimal, tetapi juga muncul ketegangan sosial yang mengganggu kohesi dan harmoni di lingkungan desa. Seperti yang dikemukakan oleh Harmin et al. (2021), ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan justru dapat memperburuk kondisi sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Menjawab persoalan tersebut, sangat diperlukan adanya sistem pendukung keputusan yang mampu mempertimbangkan berbagai aspek dan kriteria secara objektif dan terukur dalam menentukan penerima bantuan. Dalam hal ini, pendekatan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) menjadi salah satu metode yang relevan dan efektif. Menurut Kenneth Yosua Palilingan (2020), MCDM berfungsi dalam proses pemilihan dan penentuan prioritas dengan menetapkan alternatif terbaik berdasarkan sejumlah indikator atau kriteria tertentu. Melalui pendekatan ini, setiap alternatif dapat diurutkan berdasarkan tingkat preferensi dari yang paling layak hingga yang paling tidak sesuai sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih rasional, transparan, dan adil. Pendekatan semacam ini dinilai penting untuk menjamin bahwa

bantuan sosial benar-benar sampai kepada individu yang paling membutuhkan, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan tujuan awal dari kebijakan tersebut.

Berbagai studi sebelumnya telah banyak mengeksplorasi pemanfaatan metode *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) dalam konteks pengambilan keputusan, termasuk dalam domain sosial maupun non-sosial. Salah satu contoh aplikasinya ditunjukkan oleh Handoko (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Pengambilan Keputusan Pemilihan Kapten Futsal dengan Metode AHP”. Dalam studi tersebut, metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) diterapkan untuk memilih kapten futsal dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pendekatan AHP, setiap kriteria diberi bobot berdasarkan tingkat urgensinya, kemudian dilakukan perbandingan berpasangan antar alternatif guna menentukan tingkat kepentingan relatif masing-masing. Bobot akhir yang diperoleh dari proses tersebut digunakan untuk menghitung skor keseluruhan setiap alternatif, sehingga menghasilkan pilihan yang paling sesuai dengan tujuan seleksi kapten futsal yang objektif dan sistematis.

Sementara itu, Muhibah dan Tika (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Bantuan Sosial Menggunakan Metode SAW” memperlihatkan bahwa metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sangat efektif dalam proses seleksi penerima bantuan sosial. Dengan menggunakan pendekatan perankingan berdasarkan kriteria yang telah distandarisasi, metode SAW mampu memberikan rekomendasi penerima bantuan secara terstruktur dan terukur. Hasil penelitian ini memperkuat keyakinan bahwa sistem pengambilan keputusan

berbasis MCDM sangat relevan diterapkan dalam konteks distribusi bantuan sosial agar lebih adil dan tepat sasaran.

Penelitian oleh Supriyanto et al. (2022) bertajuk “Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Menggunakan AHP-SAW” menunjukkan bahwa integrasi antara metode AHP dan SAW mampu memberikan hasil perankingan yang lebih optimal. Dalam studi tersebut, AHP digunakan untuk menetapkan bobot kriteria secara sistematis, sedangkan SAW digunakan untuk menghitung dan menyusun peringkat akhir dari alternatif berdasarkan nilai yang telah dinormalisasi. Kombinasi kedua pendekatan ini terbukti lebih unggul dibandingkan penerapan metode tunggal, terutama dalam menghasilkan keputusan yang presisi dan konsisten.

Berdasarkan sintesis dari temuan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara metode AHP dan SAW berpotensi meningkatkan kualitas dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk mengembangkan riset yang berjudul ***“Sistem Pengambilan Keputusan Kelayakan Penerima Bantuan Sosial di Desa Purwoagung Menggunakan Metode Kombinasi AHP - SAW”***. Dalam konteks ini, AHP memiliki keunggulan dalam menetapkan bobot dan prioritas kriteria melalui analisis perbandingan berpasangan yang terstruktur. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada subjektivitas penilai yang dapat menimbulkan bias apabila tidak konsisten. Proses pengolahannya pun cenderung kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama jika melibatkan banyak variabel.

Sebaliknya, metode SAW dikenal memiliki karakteristik yang lebih sederhana dan efisien. Proses normalisasi dan penjumlahan tertimbang pada metode ini memudahkan analisis dalam menghadapi banyak kriteria. SAW menekankan pada kepraktisan dan efisiensi, meskipun sensitif terhadap perubahan bobot kriteria. Maka dari itu, kombinasi AHP dan SAW dianggap sebagai pendekatan yang saling melengkapi—AHP sebagai alat untuk menetapkan bobot secara obyektif, sedangkan SAW untuk mengelola nilai alternatif dan bobot agar menghasilkan keputusan akhir yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi sistem keputusan berbasis AHP-SAW dalam konteks penyaluran bantuan sosial diharapkan mampu memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Selain itu, penerapan sistem ini juga diyakini dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dalam proses seleksi penerima bantuan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan atau ketidaktepatan sasaran. Dengan begitu, efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan program sosial akan semakin meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi metode AHP-SAW digunakan dalam pengambilan keputusan bantuan sosial di Desa Purwoagung?
2. Bagaimana akurasi metode AHP-SAW untuk pengambilan keputusan bantuan sosial di Desa Purwoagung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis tata cara implementasi metode AHP-SAW dalam pengambilan keputusan bantuan sosial di Desa Purwoagung.
2. Mengetahui bentuk dari akurasi metode AHP-SAW yang digunakan dalam pengambilan keputusan bantuan sosial di Desa Purwoagung.

1.4 Manfaat Penelitian

Kajian tulisan dari penelitian ini memberikan hasil dan manfaat yang diperoleh berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Dalam hal yang lebih spesifik penelitian ini akan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai metode AHP-SAW, yang diharapkan dapat dalam pengambilan keputusan keputusan yang lebih kompleks.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan peneliti mengenai analisis permasalahan pengambilan keputusan, khususnya dalam hal proses perankingan penerima bantuan sosial di wilayah

Desa Purwoagung. Melalui penerapan metode gabungan *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dan *Simple Additive Weighting (SAW)*, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengasah kemampuan dalam mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis data dan kriteria terukur. Selain itu, pengalaman ini akan menambah pemahaman peneliti mengenai efektivitas pendekatan kuantitatif dalam konteks distribusi bantuan yang adil dan tepat sasaran.

b. Bagi Pembaca

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi yang tertarik untuk menelaah lebih dalam tentang penerapan metode AHP-SAW dalam konteks pengambilan keputusan. Hasil studi ini juga berpotensi menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji aplikasi metode serupa pada sektor-sektor sosial lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

c. Bagi Pemerintah

Bagi pihak pemerintah, khususnya pemerintah desa maupun instansi terkait yang menangani program bantuan sosial, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi penyaluran bantuan. Pendekatan berbasis metode AHP-SAW dapat menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan akurasi dalam menentukan

pihak yang layak menerima bantuan. Selain itu, sistem yang dikembangkan melalui penelitian ini dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dapat semakin meningkat.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data dalam penelitian melibatkan sejumlah informasi dari pemerintah desa purwoagung yang di dalamnya berisi data masyarakat calon penerima bantuan sosial tahun 2025.
2. Parameter batasan adalah sejumlah Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga, Status Kepemilikan Rumah, Jumlah Tanggungan Anak, Memiliki Simpanan, Bahan Bakar Memasak, Jenis lantai Rumah.

